



KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19 MELALUI TES PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION) SEBAGAI SYARAT PERJALANAN UDARA

Brigita Purnawati Manohara

Universitas esa unggul

Abstrak

Virus Covid-19 telah menyerang dunia dan setelah terkonfirmasi resmi oleh WHO (World Health Organization) mengumumkan bahwa wabah Covid-19 sebagai pandemi global. Pandemi Covid-19 telah merubah banyak hal, kesehatan fisik maupun mental, politik, pendidikan, pekerjaan, ekonomi dan sebagainya. Setiap negara termasuk Indonesia tentu memiliki penanganannya dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Penanganan ini menjadi perhatian publik sejak pandemi di Indonesia tahun 2020 sampai saat ini. Berbagai kebijakan diterapkan termasuk dalam proses penyampaian kebijakan tersebut yang menuari kontroversi dari berbagai pihak ataupun publik. Penelitian ini meneliti praktik pada kebijakan yang diatur oleh pemerintah dalam penanganan Covid-19. Dan penelitian ini memusatkan pada komunikasi pemerintah dalam penanganana Covid-19 melalui tes PCR (Plymerase Chair Reaction) sebagai syarat perjalanan udara. Alat yang digunakan dalam komunikasi pemerintah tersebut adalah media dan menimbulkan respon kurang baik dari publik.

Kata Kunci: Komunikasi pemerintah, penanganan Covid-19, test PCR.

PENDAHULUAN

Perjalanan virus Covid-19 yang masuk ke Indonesia dimulai ditemukannya kasus pertama pada awal bulan Maret 2020, terdapat dua warga Depok yang terinfeksi Covid-19. Setelah itu pemerintah mengambil tindakan dengan melakukan tracking yaitu siapa saja orang yang terakhir berinteraksi dengan dua orang pertama yang terinfeksi Covid-19 tersebut. Kemudian, tidak memerlukan waktu yang lama virus tersebut telah menyebar ke wilayah Indonesia seperti halnya di negara-negara lain. Virus corona atau SARS-CoV-2 dikenal sebagai virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona dapat menyebabkan masalah pernapasan ringan, infeksi paru-paru serius, dan bahkan kematian.

Melihat kondisi tersebut, dalam penanganannya pemerintah mulai memberlakukan peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada kondisi covid-19 gelombang I bulan Maret 2020 dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pada covid-19 gelombang II bulan Juli 2021. Selain peraturan tersebut pemerintah juga mengeluarkan peraturan syarat perjalanan udara pada masa PSBB dan yang terbaru pada awal PPKM melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan efektif mulai berlaku tanggal 3 Juli 2021.

Salah satu yang tertuang dalam syarat perjalanan udara pada masa PPKM bahwa pelaku perjalanan udara wajib menyertakan surat tes PCR (negatif covid-19). Di Indonesia sendiri terapat 3 jenis tes covid-19 diantaranya rapid tes, swab antigen dan PCR. PCR (Polymerase Chain Reaction) adalah pemeriksaan laboratorium untuk

mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus. Saat ini, PCR juga digunakan untuk mendiagnosis penyakit COVID-19, yaitu dengan mendeteksi material genetik virus Corona (aladokter.com). Seperti yang diketahui bahwa tes PCR adalah alat yang paling akurat untuk tes Covid-19 dibandingkan dengan 2 jenis alat lainnya.

Deteksi SARS-CoV-2 dengan reverse-transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) pada spesimen usap nasofaring adalah metode diagnostik utama untuk COVID-19. Data mengenai nilai cycle threshold (CT), yang berbanding terbalik dengan jumlah RNA salinan virus, telah digunakan sebagai kesimpulan dari viral load. Dalam pengaturan klinis, hasil tes diagnostik SARS-CoV-2 RT-PCR biasanya dilaporkan secara kualitatif sebagai hasil positif atau negatif menggunakan cut-off yang ditentukan, baik berdasarkan nilai CT atau terintegrasi dengan algoritma otomatis yang menafsirkan parameter berbeda dari amplifikasi potensial; Nilai CT sendiri biasanya tidak dilaporkan (Josi & Asep, 2021).

Munculnya kebijakan pembatasan kegiatan sektor publik berdampak pada banyak sektor; ekonomi, politik, budaya, pendidikan dan agama. Humas terkait perkembangan COVID-19 di Indonesia menjadi salah satu ciri pengendalian penyebaran virus tersebut. Dengan kata lain, jika publik dapat lebih memahami proses kehumasan dan konsekuensi dari tindakan yang diambil oleh pemerintah, maka publik akan melakukan kegiatan yang direkomendasikan oleh pemerintah. Kualitas humas merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah (Moch Fakhruroji, 2020).

Ini menjanjikan untuk menjadi sarana komunikasi bagi publik untuk menanggapi perilaku rasional untuk menghindari atau mengurangi risiko. Karena ketika Anda tidak yakin tentang

penyebab ketidaknyamanan dan wabah, maka komunikasi adalah kunci dan solusinya (Rika & AG Eka, 2020).

Di masa pandemi Covid-19, komunikasi merupakan langkah penting dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan individu atau masyarakat. Selain itu, Covid-19 adalah hubungan lain yang menarik perhatian orang untuk ditangani. Hal ini akan menjadi pilihan untuk memberikan informasi kehumasan kepada masyarakat melalui kebijakan social distancing. Humas menjadi pilihan terbaik dalam proses interaksi sosial dan harus terus dilakukan selama masa wabah untuk menghadapi berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh wabah COVID-19. Makna humas akan menjadi salah satu kebutuhan utama, dan komunikasi akan berada di depan umum atau public. Komunikasi publik adalah proses penyampaian informasi berupa suatu informasi. Ini mencari teknologi dalam proses hubungan masyarakat melalui media, cetak, elektronik dan online (Latif, 2020).

Melihat komunikasi pemerintah dalam penanganan Covid-19 tentulah menjadi perhatian banyak publik di media. Pemerintah adalah pusat yang menjadi tumpu masyarakat dalam menjalankan segala sesuatunya di negara ini. Maka dari itu, kebijakan yang dibuat dan disampaikan tidaklah mengandung unsur keraguan, harus stabil dan memiliki kredibilitas serta tidak merugikan banyak pihak dari kebijakan yang dibuat tersebut. Dalam hal ini pemerintah dituntut memiliki stabilitas dalam komunikasi terutama yang berkaitan dengan hal yang bersifat darurat seperti kondisi pandemi saat ini demi menumbuhkan nilai-nilai kepercayaan di mata publik.

Pada penanganannya dalam peraturan pemerintah memberlakukan sistem untuk melampirkan tes covid-19, salah satunya tes PCR dalam perjalanan udara pada masa PSBB dan PPKM. Tidak

hanya itu, hanya tes PCR yang diwajibkan pada peraturan PPKM. Dalam peraturan terbaru, tes ini pun hanya berlaku 2x24 jam sejak diambil sampel dengan biaya yang masih terbilang mahal setelah adanya penurunan harga dari tahun 2020. Hal tersebut banyak menuai protes masyarakat dan juga pihak maskapai. Menyikapi hal tersebut, pemerintah mengambil kebijakan kembali dengan menurunkan harga tes PCR melalui pesan yang disampaikan melalui media. Namun hasil kebijakan tersebut tetap mengundang komentar, selain dari biayanya yang masih terbilang mahal juga gaya komunikasi yang disampaikan terkesan tidak efektif. Terlebih dalam kebijakan yang terakhir disampaikan yaitu pemerintah melakukan perubahan yang drastis dan lebih dari satu kali dalam waktu yang singkat.

Menimba adanya perubahan kebijakan yang diinformasikan mengenai biaya tes PCR mengundang komentar dari Pengamat Hukum Administrasi Negara Universitas Nahdlatul Ulama (Unusia) Muhtar Said "Menyoroti penggunaan surat edaran (SE) yang tidak mengikat secara umum karena bersifat internal. Jika diterapkan di luar instansi, SE tidak cukup kuat untuk mengikat. Selain itu, dia menilai gonta-ganti aturan tersebut berpotensi melahirkan praduga masyarakat soal arah kebijakan yang dibuat pemerintah dan terkesan plin-plan serta tidak konsisten" (sindonews.com).

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai cara dalam menangani pandemi Covid-19 seperti halnya pada kebijakan yang dibuat dan kemudian diinformasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya dapat disosialisasikan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, referensi artikel dari jurnal, arsip, laporan media, media sosial, dan semua

sumber online. Sumber yang disarankan adalah kumpulan data berdasarkan diskusi dan evaluasi, yang kemudian dihubungkan satu sama lain. Seluruh kegiatan pengumpulan data dan analisis dilakukan secara daring karena adanya keterbatasan ruang gerak publik pada masa pandemi ini. Informasi diperoleh dengan mengutip akar masalah dan menggunakan teknik triangulasi analisis teoritis, dalam hal ini teori sosial komunikasi massa.

PEMBAHASAN

Setelah diputuskannya peraturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat pada 3 Juli 2021 khusus untuk Jawa dan Bali. Sekor perkantoran diberlakukan WFH (Work From Home) hingga 50%-100% (sektor esensial dan non esensial). Kemudian seluruh kegiatan belajar mengajar masih dengan sistem online sejak masa PSBB. Penutupan pusat perbelanjaan, pariwisata, transportasi dibatasi dengan berbagai syarat perjalanan yang ketat demi pengurangan penularan virus Covid-19 di Indonesia.

Keadaan darurat ini "memaksa" setiap orang untuk berkomunikasi dengan rekan kerja, mahasiswa, klien dan lain-lain agar pekerjaan mereka dapat terus berlanjut. Keterpaksaan ini membuat interaksi berbasis teknologi internet menjadi pilihan yang sangat wajar. Dalam upaya menggantikan interaksi manusia, beberapa platform internet tiba-tiba menjadi donor utama, dan komunikasi digital menjadi pemain utama dalam ruang komunikasi (Moch Fachruroji & dkk, 2020).

Era globalisasi telah mendorong perkembangan zaman khususnya dalam hal teknologi. Sebagai manfaatnya dalam kondisi pandemi ini, teknologi internet digunakan pemerintah untuk menyampaikan berbagai informasi terkait dengan Covid-19 yang dapat diakses secara pragmatis.

1. Komunikasi Pemerintah

Komunikasi adalah bentuk kata, itu diterjemahkan dari bahasa Inggris Communication, dan menurut cerita, itu dari Amerika, dan itu adalah bentuk berita. Memahami komunikasi dengan cara yang sederhana, jelas Harold D. Laswell adalah sebuah proses dimana seseorang dapat menginterpretasikan sebuah pesan, dapat menjelaskan untuk menjawab sebuah pertanyaan "Siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya." (Cangara, 2005).

Komunikasi pemerintah adalah komunikasi (hubungan interpersonal) antara orang-orang yang berlangsung dalam konteks instansi pemerintah. Oleh karena itu, komunikasi pemerintah tidak dapat dipisahkan dari konteks komunikasi organisasi dan merupakan bagian dari hubungan organisasi. Aliran pesan dan pesan berlangsung dalam jaringan berbasis web berdasarkan aturan standar. Informasi yang dikirim dan diterima tidak hanya berupa informasi, tetapi juga berupa gagasan (pedoman), pedoman atau perasaan (Malon, 1997: 170) yang berkaitan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah.

Erlina Hasan (2005) dalam Eri Hariyanto menyebutkan bahwa komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara.

Terlepas dari sumbernya, pembuat keputusan publik harus memilih informasi ini dan kemudian memberikan banyak informasi kepada orang-orang di dalam dan di luar organisasi. Hal ini dilakukan melalui catatan, laporan, rapat, percakapan telepon, dan pertemuan informal yang menyediakan saluran komunikasi dan pengambilan keputusan baru. Terlepas dari sumbernya, pembuat keputusan

publik harus memilih informasi ini dan kemudian memberikan banyak informasi kepada orang-orang di dalam dan di luar organisasi. Hal ini dilakukan melalui catatan, laporan, rapat, percakapan telepon, dan pertemuan informal yang menyediakan saluran komunikasi dan pengambilan keputusan baru (Ulber, 2004).

Lubis (2012) mengungkapkan hambatan-hambatan dalam komunikasi birokrasi yang meliputi gaya kepemimpinan, gaya komunikasi dan kompetensi komunikasi yang kurang baik.

2. Komunikasi Pemerintah dalam Penanganan Covid-19

Sejak Covid-19 melanda negara-negara di belahan dunia termasuk Indonesia banyak sekali dampaknya terhadap kelangsungan hidup manusia seperti kesehatan fisik maupun mental, pendidikan, pekerjaan, politik, dan tentunya pada ekonomi. Berbagai upaya pemerintah yang dilakukan untuk dapat menanggulangi ataupun mencegah penyebaran Covid-19 agar tidak semakin memburuk dan bahkan setelah adanya vaksin. Upaya tersebut tidak lepas dari komunikasi pemerintah dalam menjalankan strategi-strateginya.

Tiga isu atau entitas perlu ditangani dalam membahas hubungan risiko epidemi: (1) pemahaman kebijakan (2) model komunikasi kelembagaan dan risiko (3) penyebaran informasi darurat dan strategi umpan balik yang dinamis. Komunikasi kebencanaan merupakan perspektif dasar komunikasi dalam penanganan pandemic Covid-19. Dalam keadaan darurat, protokol hubungan masyarakat harus digunakan. Sistem komunikasi bencana memastikan bahwa pemerintah pusat setuju untuk memasukkan protokol komunikasi ke dalam manajemen dan kewaspadaannya dan siap untuk menyebarkan informasi

dengan cepat, transparan dan mudah untuk melindungi kesehatan masyarakat (Rika & Eka, 2020).

Oleh karena itu, agar memiliki strategi komunikasi yang efektif dan efisien dalam menghadapi wabah ini, masyarakat perlu diinformasikan tentang penanganan wabah ini. (Latif, 2020).

Pada tahun 2020 ketika awal pandemi, pemerintah dinilai gagal dalam menanggulangi Covid-19 terlebih dalam komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat. Banyak berita hoax, panic buying, simpangsiur informasi tentang wabah, berita konspiratif, dan sebagainya. Hal tersebut menyebabkan kekhawatiran dan ketakutan pada kondisi saat itu bahkan publik menjadi kurang percaya terhadap pemerintah. Adanya kebijakan semi lock down membuat aktivitas masyarakat terhenti sementara karena adanya pembatasan sosial dan tidak sedikit masyarakat yang protes akan hal itu karena hidup mereka berada dalam kegiatan sehari-hari yang dijalankan. Seperti yang dikatakan (Massagung, 2020) Kebijakan pembatasan aktivitas untuk mengekang penyebaran wabah telah berdampak negatif terhadap perekonomian dunia. Ekonomi dunia bahkan diprakirakan tumbuh negatif pada 2020. Kinerja manufaktur dan jasa melemah tajam, yang menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan.

Melalui komunikasi yang baik, tersusun, terencana, dan juga terarah maka audience akan mencerna dengan baik kemudian diimbangi dengan tujuan yang jelas daripada komunikasi yang disampaikan tersebut apalagi sifatnya penting atau darurat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Middleton, strategi komunikasi merupakan upaya mengkombinasikan komponen-komponen komunikasi baik dari penyampai pesan/komunikator, pesan, saluran, penerima sampai efek yang dirancang untuk mencapai tujuan

komunikasi yang optimal (Cangara, 2017).

Lembaga dalam menjalankan kegiatannya tidak lepas dari adanya komunikasi. Karena komunikasi dalam sebuah intitusi memegang peran penting terhadap proses kelancaran penyampaian pesan dan pertukaran pesan atau informasi. Dalam rangka menjalankan perannya sebagai sentral kemajuan lembaga, maka seorang divisi komunikasi lembaga harus mempunyai strategi yang kuta dalam menyampaikan komunikasi terhadap publik atau masyarakat, sehingga komunikasi yang kuat bisa membawa ke arah kemajuan pada suatu perusahaan, lembaga, atau organisas (Rosadi Ruslan, 2020).

Dalam konteks ini, pandemi COVID-19 harus ditangani melalui manajemen bencana modern, karena ketika suasana nyaman, tidak menentu, komunikasi menjadi kunci dan solusi.

Mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk menghadapi keadaan darurat adalah suatu krisis (Rika & Eka, 2020).

Ketika krisis, seperti pandemi COVID-19, penting untuk memiliki perspektif yang benar. Di masa krisis, seperti pandemi COVID-19, penting untuk memiliki perspektif yang benar. Risk communication adalah kombinasi dari elektronik, teknologi komunikasi komputerisasi yang mengubah, mengubah, mengubah dan mendorong ingatan, keyakinan, dan perilaku manusia (Indah & Luki, 2020).

Dalam hasil penelitian (Jeini, 2020) yaitu Masyarakat merasa pemerintah kurang baik dalam melaksanakan kebijakan dalam rangka pengendalian masyarakat terhadap Covid-19 sehingga masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang benar bahkan dapat terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Untuk itu, pemerintah diharapkan melakukan berbagai kegiatan dan regulasi masyarakat secara mingguan melalui

pembicara, ibadah, radio, televisi, dan media sosial untuk memberikan informasi yang akurat tentang upaya pencegahan Covid-19.

Adapun peran media massa dalam membantu pemerintah untuk menangani Covid-19 terbukti sejak awal pandemi. Media massa adalah salah satu alat penting untuk penyampaian informasi kepada khalayak dengan cepat dan efisien. Namun perlu diperhatikan bahwa pesan tersebut harus dipersiapkan dengan baik, karena pemerintah memiliki peran sentral dan sangat penting dalam hal ini. Apabila terdapat keraguan atau kesalahan pesan yang disampaikan akan menimbulkan persepsi tidak baik di mata khalayak. Seperti yang dikemukakan oleh (Latif, 2020) Penggunaan media berimplikasi pada gugus tugas pengendalian Covid-19. Kabupaten Tulungagung, menurut Media pendidikan merupakan platform penting untuk menyebarkan informasi atau informasi kepada khalayak (media) yang lebih luas seperti surat kabar, film, radio dan televisi.

3. Komunikasi Pemerintah (Kebijakan Tes PCR (Polymerase Chain Reaction) Sebagai Syarat Perjalanan Transportasi Udara)

Dilansir dalam (lan.go.id) Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara, Dra. Elly Fatimah, M.Si mengatakan bahwa komunikasi menjadi hal yang terpenting bagi kehidupan bersama, tidak terkecuali komunikasi kebijakan. Masih banyak praktik-praktik kebijakan yang mengesampingkan aspek komunikasi publik, sehingga menimbulkan berbagai kesalahpahaman dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran bersama dari para perumus dan pemangku kebijakan agar memasukkan strategi komunikasi yang baik sebagai salah satu instrumen untuk

mendukung implementasi kebijakan yang efektif.

Tes PCR mulai dikenal oleh masyarakat sejak pandemi Covid-19 melanda. Uji ini untuk mendeteksi seseorang terkena virus atau tidak dan dilakukan di rumah sakit melalui proses labotarium sehingga memerlukan waktu untuk mengetahui hasilnya dan tentu harus didukung oleh biaya yang tidak sedikit hanya untuk sekali tes. Tes PCR (Plymerase Chain Reaction) dikenal sebagai tes yang paling akurat untuk mendeteksi Covid-19 dibandingkan dengan swab antigen atau tes antibodi.

Keunggulan yang dimiliki metode RT-PCR adalah kemampuan alatnya yang mampu memeriksa dalam jumlah banyak dalam satu waktu. Namun metode RT-PCR membutuhkan teknisi profesional yang mampu melakukan pemeriksaan RT-PCR dan menganalisis data dengan tepat, serta peralatan khusus karena proses mpengerjaannya yang relatif lebih rumit (Bai et al., 2020).

PCR memiliki kekurangan antara lain peralatan dan biaya pemeriksaan yang mahal, waktu pengerjaan yang cukup lama (2-3 jam), dan risiko paparan yang tinggi. Mengingat proses pengerjaan yang lebih kompleks maka diperlukan petugas laboratorium dengan keahlian khusus dan 2berkompeten untuk mengurangi kemungkinan kesalahan teknis (Anita & Rizana, 2020).

Dikutip dalam (bisnis.tempo.com), berikut rangkuman harga tes PCR di Indonesia sejak awal pandemi hingga akhir Oktober 2021 :

a) Rp 2.500.000

Pada hari-hari awal epidemi CVD-19, biaya pengujian PCR tetap tinggi. Biaya PCR per Rp 2,5 juta, menurut Presiden Garda Indonesia Irfan Setiyaputra. Dia mengatakan ini bisa terjadi. Artinya lebih mahal dari tiket pesawat. "Lebih mahal daripada

pindah dari satu kota ke kota lain," katanya kepada Departemen Perhubungan di Wenner, Selasa, 2 Juni 2020. Bisnis.com

b) Rp 900.000

Pada hari-hari awal epidemi CVD-19, biaya pengujian PCR tetap tinggi. Biaya PCR per Rp 2,5 juta, menurut Presiden Garda Indonesia Irfan Setiyaputra. Dia mengatakan ini bisa terjadi. Artinya lebih mahal dari tiket pesawat. Kementerian Kesehatan dan Regulator Keuangan dan Pembangunan BKKP telah menetapkan batasan Rp. 900.000. Pada awal wabah, biaya tes PCR sangat tinggi, mencapai 900.000 rubel, menurut Abdul Kadir, direktur Departemen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Ini termasuk biaya operasional.

c) Rp 450.000 - Rp 550.000

Pada Minggu, 15 Agustus 2021, Menteri Kesehatan Budi meminta penurunan biaya tes PCR, yakni antara 750.000 hingga 1,5 juta rubel. Tes PCR di wilayah 450.000 hingga 550.000 rubel. 525, dan . Efektif 17 Agustus 2021.

d) Rp 300.000

Belakangan ini banyak menuai kritik atas hasil tes negatif Covid-19 menggunakan polymerase chain reaction atau PCR 2x24 jam. Hal ini karena pengujian PCR sangat mahal dan waktu yang dapat diterima relatif singkat. Menanggapi kritik terhadap aturan tersebut, Presiden Jockey mengatakan

tes PCR akan dikurangi menjadi Rs 300.000 dan digunakan 3x24 jam.

Sepanjang kebijakan mengenai biaya tes PCR pemerintah telah menginformasikan adanya perubahan harga dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut telah dikoordinasikan dengan menimba keadaan pada masa pandemi. Melalui kebijakan tersebut diharapkan masyarakat tetap dapat melakukan aktifitasnya dengan begitu pergerakan ekonomi di Indonesia tetap berjalan sesuai harapan. Karena dampak pandemi ini yang hampir melumpuhkan semua kegiatan masyarakat di wilayah Indonesia membuat permasalahan besar dalam perekonomian di negara ini. Kebijakan pemerintahpun tidak lain adalah untuk menangani Covid-19 agar tidak semakin meluas dan memburuk termasuk dalam peraturan tes PCR sebagai syarat perjalanan transportasi udara.

Pengamat transportasi Alvin Lie menyebutkan bahwa aturan wajib menyertakan hasil tes PCR bagi pelaku perjalanan udara menyulitkan calon penumpang. Selain persoalan biaya, calon penumpang pesawat juga mengeluhkan waktu untuk mengetahui hasil tes PCR yang tidak singkat sehingga kondisi tersebut sangat merepotkan. Tidak hanya itu, banyak penumpang yang memberatkan atas peraturan tersebut, selain biaya yang mahal dari pada harga transportasinya dan masa berlaku tes PCR hanya 2x24 jam sejak diambil sampel (katadata.co.id).

Kemudian kebijakan ini menyebabkan maskapai penerbangan dan tempat pariwisata menjadi sepi. Banyak yang mengeluhkan akan hal ini termasuk para penumpang pesawat. Menurut data UNWTO, industri pariwisata global memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 22% pada kuartal pertama hingga 20 tahun, dengan potensi pengurangan 60%-80%

pada tahun 2020. Penerapan ban perjalanan juga telah mengganggu industri penerbangan, perjalanan, dan perhotelan. Asosiasi Penerbangan Internasional (IATA) memperkirakan potensi kerugian industri penerbangan pada 2020 sebesar \$314 miliar akibat pandemi COVID-19. Maskapai menunda perawatan maskapai, menunda rencana investasi, menyerukan PHK besar-besaran bagi pekerja yang bergantung (KPMG, 2020).

Dalam berita (ekonomy.okezone.com) Ikatan Pilot Indonesia berharap syarat penerbangan dengan melampirkan tes PCR ditinjau ulang. Pasalnya, syarat perjalanan yang mahal menjadi penyebab menurunnya jumlah penumpang dan menyebabkan berkurangnya jumlah penerbangan. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya pengoperasian pesawat di beberapa maskapai Indonesia. Sehingga, terjadi pula pengurangan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), penundaan, penagguran hingga pemotongan gaji, serta pegawai yang dirumahkan bahkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu dikutip dalam (bicaraberita.com) Dr. Tirta memberikan kritik atas kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 "Penanganan corona atau Covid-19 di Indonesia, terutama bagian pemeriksaan PCR nampaknya begitu buruk gara-gara harga yang tinggi tidak seperti di India". Dan kritikan yang terbaru dalam akun Instagram @dr.tirta "Izin ni ndan @kemenhub151, mohon tny korelasinya apa nih? Swab antigen dan swab pcr ama transportasi? Ada jurnal atau bukti ilmiahnya sebelum membuat kebijakan?".

KESIMPULAN

Melihat kondisi pandemi ini adalah hal yang sulit bila tidak ditangani dengan baik dan benar. Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang

dinilai kurang tepat publik. Kemudian tidak semua masyarakat memiliki kemampuan kritis dalam mencerna berita maupun informasi menjadi bagian persoalan yang cukup rumit dalam penanganan Covid-19, sehingga menjadikan proses komunikasi tersebut tidak tersalurkan dengan baik.

Ditinjau dari komentar publik terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19 bahwa kebijakan haruslah mementingkan posisi masyarakat akan dampaknya. Terlebih dalam penyampaian informasi sebagai landasan khalayak akan kebijakan yang disampaikan.

Dalam era globalisasi ini di mana segala sesuatunya dapat dijangkau dengan mudah. Adanya media massa, media social, dan sebagainya adalah bentuk penunjang untuk melakukan komunikasi secara langsung, terarah dan efisien. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk deliver informasi kepada audience dengan praktis. Tapi perlu diperhatikan akan dampak dari perkembangan zaman ini, internet sudah menjadi jalan utama sebagai pencarian berita saat ini. Kesalahan informasi ataupun kurang akuratnya sebuah informasi akan berdampak terhadap perspektif tidak baik dari pembaca (khalayak).

Selama pandemi Covid-19 pemerintah menggunakan komunikasi media massa atau media sosial. Segala bentuk informasi yang berhubungan dengan virus Covid-19 dapat ditemukan di mesin pencarian internet, berita media online, media sosial, televisi, radio, koran maupun majalah. Penanganan Covid-19 juga menjadi perhatian publik selama ini. Berbagai berita maupun penelitian ilmiah terpampang dengan jelas bahwa kebijakan, peraturan maupun komunikasi pemerintah telah menjadi fenomena untuk dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina Suswanti Anita & Rizana Fajrunni'mah. (2020). Perbandingan Metode RT-PCR dan Tes Rapid Antibodi untuk Deteksi Covid-19. Jurusan.Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Volume 6.

Aladokter, dalam <https://www.alodokter.com/mengenal-tes-PCR-untuk-mendiagnosis-covid-19>, diakses tanggal 10 November 2021 pukul 07.00 WIB. Bicara berita, dalam <https://www.bicaraberita.com/nasional/pr-42886117/harga-pcr-lebih-mahal-dari-india-bobrohnya-penanganan-corona-indonesia-disinggung-dr-tirta?page=all>, diakses tanggal 10 November 2021 pukul 15.00 WIB.

Citraningru Permatasari Prita. (2016). Komunikasi dan Persepsi Mengenai Kepemimpinan Perempuan Dalam Masyarakat Jawa. Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dephub, dalam <http://www.dephub.go.id/post/read/kemenhub-kembali-sesuaikan-syarat-perjalanan-dalam-negeri>, diakses tanggal 11 November 2021 pukul 13.20 WIB.

Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 18.

Hariyanto Eri. (2005). Komunikasi Pemerintah dan Efektivitas Kebijakan.

Josi & Asep. (2021). Hubungan Antara CT Value pada Test RT-PCR Terhadap Parameter Klinis Pasien COVID-19. Universitas Lampung 2 Bagian Farmakologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung. Jurnal Medula Volume 11 Nomor 1. Kemenkes dalam <https://www.kemkes.go.id/article/view/21081600001/pemerintah-menurunkan-harga-pemeriksaan-rt-pcr-sebesar-45-.html>, diakses tanggal 10 November 2021 pukul 09.00 WIB.

Kompas, <https://www.kompas.com/travel/read/2021/11/03/210000265/aturan-perjalanan-sering-berubah-pengamat-pemerintah-punya-arah-kebijakan?page=all#page2>, diakses tanggal 11 November 2021 pukul 12.00 WIB. Lan, dalam <https://lan.go.id/?p=6827>, diakses tanggal 13 November 2021 pukul 13.00 WIB.

Laksmiwati Indah & Lukki Lukitawati. (2020). Komunikasi Publik Menteri Kesehatan

Brigita Purnawati Manohara

Komunikasi Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Melalui Tes Pcr (Polymerase Chain(Hal 512-521)

Terawan. Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Diponegoro.

Lianjani Aprilia. (2018). Strategi Komunikasi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan Dalam Mensosialisasikan Program Smart City. Skripsi. Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Malone, Samuel A. 1997. *Mind Skills for Managers*. England: Gower Publishing Limited.

Nurhidayanti, Enderia, & Via. (2021). Penyuluhan Masyarakat Mengenai Efektifitas Rapid Test Antibodi dan Antigen Dalam Mendeteksi Covid-19. *Kebidanan IKesT Muh ammadiyah Palembang. Journal khidmah.v3il.346.Vol.3 No.1.*

Oktariani Rika & Eka Wenats Wuryanta. (2020). Komunikasi Pemerintah Melalui Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kepada Publik. *Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Interstudi Jakarta. Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 03, No. 02. Setkab*, dalam <https://setkab.go.id/kemenhub-terbitkan-aturan-pengetatan-perjalanan-dimasa-ppkm-darurat/>, diakses tanggal 10 November 2021 pukul 11.00 WIB.

Simatupang, Harsudianto, Seriga & Regina. (2021). Pelaksanaan Rapid Test Antigen Covid-19 Kepada Generasi Muda Kota Medan dan Deli Serdang. *STIKes Murni Teguh Jl. Jawa No. 2, Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Jurnal Abdi Moestopo Vol. 04, No. 02, pp.73-79.*

Silalah Ulber. (2004). Komunikasi Pemerintah: Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No. 1.*

Suksmonohadi Masagung & Diah Indira. *Kebijakan Penanganana Pandemi Covid-19. Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional - Edisi II 2020.*

Syaipudin Latif. (2020). Peran Komunikasi Massa di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung). *IAIN Tulungagung. Vol. 2, No. 1.*

Syauqi Achmad. 2020. *Jalan Panjang Covid-19 (sebuah refleksi dikala wabah merajalela berdampak pada perekonomian)* Magister Ekonomi Syari'ah Pasca Sarjana IAIN Pontianak. A. Syauqi /JKUBS Vol.1 No.1 1-19.

Sulistyowati Fadjarini, Nina Uswatun Hasanah2. (2020). Strategi Komunikasi Pemerintah Indonesia dalam Penanganan COVID-19 pada Majalah TEMPO. *Prodi Ilmu Komunikasi STPMD "APMD" Yogyakarta.Tempo Bisnis*, dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1521706/harga-tes-pcr-dari-rp-2-500-000-di-awal-pandemi-kini-turun-jadi-rp-300-000/full&view=ok>, diakses tanggal 11 November 2021 pukul 13.00 WIB.

Yohanes. (2017). *Transparansi Komunikasi Dalam Birokrasi Pemerintahan. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT. Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol. 21No.1JUNI 2017: 49-57.*